



**SERANGAN
TERHADAP
PEMBELA HAK
LGBT MENINGKAT
DI INDONESIA**

f **FRONT LINE
DEFENDERS**



Kami sudah tahu sebelumnya bahwa event kami akan diserang - orang-orang ekstremis menilpun kami dan mengatakan rencana mereka akan menyerang kita. Kami memberitahukan polisi sebelumnya, tetapi mereka tidak mau datang. Kami menilpun mereka pada waktu kami diserang, mereka tidak mau datang.

Untuk melindungi teman-teman kami, beberapa di antara kami (pembela HAM) berposisi antara para penyerang dan teman-teman kami. Akhirnya polisi datang pada ujung kejadian dan mereka hanya menonton bagaimana kita dihantam.



DAFTAR ISI

Terminologi	4
Ringkasan Eksekutif	5-8
I. Lebih Bahaya Daripada "Perang Nuklir"	9-11
II. Penggeladahan dan Penyerangan	12-15
III. Ancaman & Pelecehan	16-20
IV. Akibat	21-23
V. Rekomendasi	24-25

Terminologi

LGBT dan SOGIE

Majoritas dari pembela HAM yang kami, regu Front Line Defenders, temukan di Indonesia membuat definisi pekerjaan mereka sebagai pembelaan hak-hak yang meliputi orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi (SOGIE).^{*1} Singkatan LGBT mengacu pada lesbian, gay, biseksual dan transgender, yang di banyak negara lain oleh para pembela HAM dinyatakan menjadi masalah karena berbagai alasan. Di Indonesia, menurut berbagai pembela HAM, singkatan LGBT mengandung konotasi kuat sebagai sesuatu dari dunia Barat, maka hal ini digunakan untuk mencap dan mengutuk pekerjaan mereka sebagai sesuatu yang 'asing' yang berbahaya untuk kebudayaan Indonesia. Sebagai contoh: beberapa pembela HAM memberitakan bahwa, setelah di Amerika Serikat 'Perkawinan Setara' disahkan oleh Mahkamah Tinggi AS pada tahun 2015, mereka mendapat beribu-ban ancaman atas seolahnya mereka mendukung 'perkawinan gay di Indonesia', padahal tidak pernah hal ini dikemukakan.

Agar tidak menambah risiko dengan menggunakan seolah terminologi 'dunia Barat', maka banyak pembela HAM di Indonesia lebih mengemukakan singkatan hak SOGIE, karena lebih luas dan lebih inklusif. Singkatan ini mengikutsertakan identitas gender, ekspresi dan seksualitas sebagai kategori-kategori identitas, lain daripada membatasi empat kelompok yang sudah berdefinisi ketat yang sudah dikenal (lesbian, gay, biseksual dan transgender), akan tetapi yang belum tentu mencakup semua identitas yang berada dalam sebuah masyarakat.

Maka untuk memberi gambaran yang sesuai dan untuk menghormati perjuangan pembela HAM di Indonesia, Front Line Defenders akan menggunakan perkataan 'hak-hak SOGIE' dalam laporan ini kalau mengacu pada pekerjaan para pembela Indonesia, dan akan menggunakan istilah 'komunitas/masyarakat LGBT' kalau berhubungan dengan penggunaan perkataan pembela HAM itu sendiri kami.

Kelompok-kelompok ekstremis

Kalau organisasi-organisasi masyarakat sipil dan para pembela HAM di Indonesia menggunakan istilah 'ancaman dari kelompok ekstremis', secara lazim yang dimaksud adalah ancaman yang diterima dari seseorang yang dikenal sebagai anggota dari salah satu atau lebih dari satu organisasi agama konservatif politik dan/atau militan. Ini termasuk organisasi-organisasi seperti antara lain Front Pembela Islam, Jaringan Islamia, Hizbul Tahrir Islam, atau Persaudaraan Islam.



"Pertama 100, lalu 200, lalu lebih dari 500 komen kekerasan di blog saya. **Berarti ini sama dengan 15 halaman yang penuh dengan ancaman pembunuhan.**"

1. Pada bulan Juni 2016, Dewan Hak Asasi Manusia dari PBB memberi mandat kepada "seorang Ahli Mandiri untuk perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender" (resolusi 32/2). Penggunaan terminologi SOGI, yang lebih luas dijadikan SOGIE (dengan tambahan 'Ekspresi'), dikemukakan sebagai istilah yang lebih inklusif dan deskriptif.

Ringkasan Eksekutif

Para pembela HAM yang bekerja perihal masalah yang berkenaan dengan orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi (SOGIE) sejak lama beroperasi dalam keadaan yang tidak tenteram. Akan tetapi belakangan ini, mereka menghadapi suasana yang makin berbahaya, yang tidak dialaminya sejak beberapa windu, demikian menurut 25 pembela HAM yang diwawancarai oleh Front Line Defenders pada bulan Juli 2017.

Indonesia tidak mempunyai Undang-Undang Negara tertentu yang melindungi kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang melindungi mereka terhadap diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh polisi negara dan kelompok-kelompok ekstremis agama. Tidak lebih jauh daripada bulan oktober 2017, aparat kepolisian menangkap lebih dari 50 orang lelaki dalam pemberantasan sebuah 'sauna gay', yang merupakan insiden terakhir dalam rentetan insiden yang makin memburuk dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini terhadap komunitas LGBT. Bilapun demikian, dengan adanya insiden-insiden kekerasan dan pelecehan ini yang berterusan, pemerintah nasional tidak pernah menyatakan kriminal kelakuan seksual sesama jenis. Pada kurun waktu beberapa windu sebelumnya, jumlah dan kapasitas pembela-pembela SOGIE dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya makin bertambah di seluruh Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia, para aktivis SOGIE telah mempunyai ruang kerja berupa kantor yang aman, juga berhasil meraih beberapa kemenangan di bidang hukum, serta mengadakan berbagai event umum yang cukup besar, biarpun dirasakan berbagai hambatan dan risiko yang dialami para pembela, yang berbeda jauh dari propinsi ke propinsi.

Di awal tahun 2016, para pembela HAM mulai melaporkan serangan-serangan baru terhadap hak-hak SOGIE. Serupa badai, ungkapan-ungkapan yang berisi kekerasan diucapkan oleh pegawai negeri dan instansi-intansi keagamaan yang membanjiri warta berita. Demikian juga dari pihak pemerintah, mulai dari Wakil Menteri Perguruan Tinggi hingga Komisi Penyiaran Indonesia mengemukakan pernyataan-pernyataan yang memojokkan kelakuan sesama

jenis, ditambah pula Menteri Pertahanan yang menyatakan gerakan LGBT lebih "berbahaya" daripada bom nuklir.

Pengungkapan-pengungkapan anti LGBT dari lapisan atas ini disambung dengan berbagai pemberantasan polisi dan serangan-serangan fisik dari pihak ekstremis agama pada berbagai pertemuan dan event LGBT. Para pembela HAM yang mewakili komunitas-komunitas ini mulai melaporkan peningkatan besar dari ancaman pembunuhan dibanding jaman-jaman sebelumnya.

Aparat polisi daerah maupun negara secara sistematis menolak permintaan-permintaan perlindungan dari pembela HAM, walaupun kelompok-kelompok ekstremis secara umum telah menyatakan sebelumnya akan menyerang seorang aktivis SOGIE atau sebuah pertemuan LGBT. Dengan tiadanya perlindungan pemerintah, para aktivis terpaksa mengurangi keterlibatan sosial mereka, serta kegiatan-kegiatan pengembangan daya sosial yang sebelumnya dilakukannya. Para pembela HAM menyatakan bahwa penolakan perlindungan terhadap para aktivis atau pelaksanaan event SOGIE merupakan perubahan yang sangat ketara belakangan ini; dibanding dengan misalnya ancaman Islamis untuk membakar festival film transgender di Jakarta pada tahun 2010, pada waktu itu polisi segera tiba di tempat untuk melindungi pembela-pembela HAM dan para artis yang menyelenggarakan event ini.

Sepanjang tahun 2016, para pembela HAM menyatakan kecemasan mereka, terutama terhadap pelanggaran hak-hak mereka untuk bebas berkumpul dan berasosiasi: terjadinya berbagai pemberantasan polisi, serangan dari kelompok ekstremis pada perkumpulan-perkumpulan LGBT, serta ketidakmampuan dari pihak pemerintah untuk melindungi tempat-tempat aktivis dari serangan yang padahal diumumkan dan direncanakan sebelumnya. Di tahun 2017, keadaan telah berubah menjadi kenaikan ancaman kepada pribadi seseorang. Para pembela HAM mengatakan ancaman-ancaman yang mereka terima sekarang lebih bertarget dan lebih secara pribadi.

Para pembela HAM menyatakan bahwa bahaya utama sekarang untuk komunitas LGBT adalah pemberantasan polisi, dan bahwa homofobia dengan kekerasan di dalam instansi-instansi keamanan negara makin bertambah.

Ancaman terhadap pembela HAM melalui tilpun dan media sosial, serta pelecehan di hadapan seorang, makin bertujuan, makin secara pribadi, dan makin bertambah keras. **Dari 25 pembela HAM yang diwawancarai oleh Front Line Defenders pada bulan Juli 2017, 23 di antaranya menyatakan telah menerima ancaman pembunuhan secara langsung di tahun sebelumnya.**

Banyak pembela HAM menyatakan peningkatan ancaman tilpun anonim di waktu malam. Juga, salah satu di antaranya telah menerima lebih dari 500 komen penuh kekerasan di internet dari sebuah sajak yang dikarangnya sebagai jawaban ketidaksetujuan tweet seorang menteri yang penuh kekejian terhadap LGBT.

Dengan peningkatan ancaman-ancaman terhadap para pembela di tahun 2016 dan 2017, kelompok-kelompok masyarakat makin diikat daya gerakannya untuk menanggulangi serangan-serangan terhadapnya. Para pembela dari Aceh, Jakarta, Makasar dan Yogyakarta menyatakan efek-efek negatif yang dihampar pada pekerjaan mereka, yang berhubungan dengan ancaman-ancaman yang dihadapinya, adalah termasuk pengurangan aktivitas karena alasan keamanan, pengurangan kepercayaan dan pengikutsertaan dari anggota-anggota masyarakatnya, 'burnout' karena kekurangan pembela HAM yang aktif, serta perlu bertambahnya anggaran untuk keamanan dan perlindungan, termasuk perpindahan, yang merugikan (dan harus berkurangnya) tindakan-tindakan dukungan lain.



Yogyakarta

Pokok-Pokok Utama Hasil Penyidikan

- 23 dari 25 orang pembela HAM, yang ditemukan oleh regu Front Line Defenders di berbagai tempat di ke-empat propinsi, menyatakan telah menerima ancaman pembunuhan sejak awal tahun 2016. Ancaman ini berupa ancaman melalui internet (terkadang beraturan pada posting blog, Facebook, dsb.), dan juga serangan kelompok ekstremis pada waktu menyelenggarakan event LGBT dengan ancaman akan menggantung mereka.
 - Para pembela HAM merasa makin bertambahnya penggunaan perkataan beragama pada saat ditilpun dengan ancaman atau pada serangan melalui internet, seperti misalnya "darahmu halal", yang dapat diartikan bahwa membunuh mereka diperbolehkan dari agama Islam.
 - Paling sedikit 3 organisasi pembela hak SOGIE telah terpaksa memindahkan kantor mereka dalam jangka waktu dua tahun belakangan ini, oleh karena penggeladahan atau intimidasi secara badaniah. Penggeladahan-penggeladahan dan ancaman-ancaman ini dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis, sementara polisi mengabaikan panggilan untuk membantu, dan juga oleh polisi syariah setempat. Kebanyakan pembela HAM sekarang memilih bertemu di hotel atau kafe, yang akan tetapi menghambat ranat privasi dan akses pada jasa untuk masyarakat mereka.
 - Tidak adanya tempat yang aman untuk bertemu adalah hambatan dan risiko utama untuk pembela HAM di seluruh Indonesia, terutama di propinsi Aceh, daerah satu-satunya di Indonesia yang memperlakukan Hukum Syariah. Dinyatakan kepada regu Front Line Defenders, oleh lebih dari sepuluh orang pembela HAM yang ditemui di ibukota propinsi Banda Aceh, bahwa mereka semua sangat takut pada pemberantasan setiap hari Jumat yang dilakukan oleh polisi syariah.
 - Pelecehan di media dan ucapan-ucapan yang mengandung kekerasan dari pegawai-pegawai tinggi pemerintahan (seperti antara lain dari Menteri Pertahanan dan Kepala Polisi Jawa-Barat) merupakan alasan-alasan utama yang menghasilkan para pembela HAM terpaksa mengurangi gerak aktivis mereka, yang menyatakan merasa terbungkam antara dua pilihan: meneruskan pekerjaan mereka atau mentaati permintaan dari pihak keluarga dan teman-teman mereka yang merasa turut diperbahayakan.
 - Para pembela HAM menyatakan bahwa berbagai akun media sosial yang dikenal berafiliasi pada kelompok-kelompok muslim, makin sering menyantumkan foto atau video dari para aktivis dengan seruan umum untuk menyerang mereka.
- Berbagai pembela HAM maka terpaksa menghapus, mematikan atau mengubah nama profil sosial media mereka, hal-hal yang jelas menghambat pekerjaan mereka sebagai aktivis LGBT, yang kebanyakan menyebarkan informasi melalui forum-forum secara online, demi keamanan juga.
- Untuk para pekerja seks transgender, yang juga aktif dalam pengembangan berbagai strategi keamanan di dalam masyarakat mereka, dialami risiko yang paling besar dalam hal sandang dan pangan. Berterus-terus tidak mempunyai tempat tinggal, kemiskinan dan kesulitan mencari makan, membuat mereka harus bekerja di malam hari, yang lalu menghambat kegiatan membantu masyarakat mereka di malam hari juga, pada waktu yang paling diperlukan.
 - Para pembela hak pekerja seks dari Yogyakarta melaporkan makin sering ditarget oleh polisi 'di malam hari' (pada waktu mereka bekerja sebagai pekerja seks), karena mereka dikenal sebagai aktivis 'di siang hari'.
 - Para pembela HAM transgender di Aceh dan Yogyakarta melaporkan menerima ancaman sangat keras sehubungan dengan masa transisi mereka, termasuk dimaki secara umum oleh polisi syariah karena tidak mengenakan baju sesuai tradisi Islam yang ketat (dinyatakan oleh seorang wanita yang sedang berubah menjadi lelaki, sebagai contoh), atau juga sewaktu mereka bertemu di tempat umum yang bercampur jenis.
 - Keamanan yang makin berkurang mengakibatkan masyarakat yang dituntun para pembela HAM menjadi kurang percaya. Bahkan pada beberapa kejadian, para pembela HAMnya justru disalahkan oleh masyarakat LGBTnya telah 'menghasilkan' terjadinya pemberantasan. Sederajad dengan ini, para pembela HAM juga dikritik oleh anggota-anggota masyarakatnya kalau memperketat kriteria keamanan atau kepribadian, yang dikatakan mempersulit mengadakan pertemuan.
 - Kebanyakan dari pembela HAM yang ditanya mengatakan dampak dan kesulitan yang paling besar (yang juga merupakan faktor utama menjadi 'burn-out') adalah hilangnya kepercayaan dari masyarakat mereka - yang oleh banyak di antara mereka disebut 'pemberantasan kedua'. Setiap pembela HAM yang diwawancarai oleh Front Line Defenders menyatakan bahwa paling sedikit satu di antara rekan-rekan mereka sudah berhenti atau sangat mengurangi kegiatannya, karena berbagai pemberantasan, dan ancaman kepadanya dan keluarganya, serta tidak diusutnya serangan-serangan ini dari pihak pemerintah.

Misi Front Line Defenders

Front Line Defenders mengadakan misi pada bulan Juli 2017 untuk menyidik tentang ancaman-ancaman yang dilakukan terhadap pembela hak LGBT, apa saja risiko yang mereka hadapi, serta jawaban dari pihak pemerintah. Front Line Defenders bertemu dengan lebih dari duapuluh pembela HAM yang bekerja dalam bidang pembangunan dan perlindungan hak-hak SOGIE dan di dalam masyarakat-masyarakat yang beridentitas LGBT di empat propinsi, yakni: Aceh, Makasar, Yogyakarta dan Jakarta.²

Rekomendasi-Rekomendasi Utama

Biarpun terdapat suasana yang memburuk bagi para pembela hak SOGIE, pembicaraan yang diadakan oleh Front Line Defenders dengan mereka menandakan keinginan besar mereka untuk meneruskan pekerjaan mereka. Para pembela HAM ini juga telah memberikan berbagai rekomendasi yang konkrit sebagai sarana dan keperluan agar dapat melakukan pekerjaan mereka secara aman. Perkembangan kapasitas, berbagai sarana untuk menambah keamanan, advokasi dari pihak nasional maupun lokal, implikasi media serta penyadaran masyarakat umum, inilah adalah hal-hal yang dikemukakan oleh para pembela HAM yang dapat memperbaiki kondisi pekerjaan dan keamanan mereka.

Para pembela HAM juga memberikan berbagai saran perbaikan di tingkat nasional, termasuk:

- Mengakhiri penggunaan dari orang-orang berpolitik yang menyebarkan kebencian terhadap masyarakat LGBT agar mendapat dukungan dan suara dari rakyat, sekaligus menjauhi perhatian dari perbuatan-perbuatan KKN mereka;
- Menghentikan ucapan-ucapan perlecehan yang digunakan oleh pejabat-pejabat resmi pemerintah nasional terhadap para pembela hak SOGIE;
- Menambah perlindungan dari pihak polisi dan instansi-instansi pemerintah lain terhadap ancaman yang dilakukan terhadap kaum LGBT;
- Mensyahkan dan memperlakukan rekomendasi-rekomendasi Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review - UPR) yang baru dikeluarkan sehubungan dengan perlindungan pembela-pembela LGBT dan anti-diskriminasi;

Para pembela yang berisiko juga mengajukan beberapa macam dukungan yang dapat diberi oleh masyarakat internasional - khususnya dari perwakilan kedutaan Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang berada di Jakarta - yang kemungkinan besar akan dapat menambah kondisi keamanan mereka. Antar lain adalah:

- Memberikan tempat-tempat yang aman untuk mengadakan pertemuan dan event kepada para pembela dan organisasi-organisasi hak SOGIE yang berada di luar Jakarta;
- Memberitahukan para pembela HAM adanya dukungan dan bantuan darurat dari Uni Eropa, (beasiswa ProtectDefenders.eu, pembiayaan, transportasi, dll.);
- Menekankan pada pemerintah Indonesia dan pejabat-pejabatnya perlunya dilindung para pembela hak SOGIE di bidang umum maupun di lingkungan pribadi mereka, serta kewajibannya mengimplementasikan secara penuh rekomendasi-rekomendasi UPR (Tinjauan Periodik Universal) yang baru dikeluarkan sehubungan dengan perlindungan pembela SOGIE dan hukum-hukum anti-diskriminasi;
- Mengundang para pembela HAM untuk perundingan dan menemui para pembela hak SOGIE jika berkunjung ke daerah, agar mengetahui keperluan keamanannya;
- Memonitor secara jelas ucapan-ucapan kebencian terhadap kaum LGBT maupun serangan-serangan fisik yang (akan) diadakan dalam menghadapi Pemilihan Umum di tahun 2019, dan memberitahukan pemerintah Indonesia akan melakukan hal ini.

Untuk daftar lengkap Rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya dan Amerika Serikat, lihatlah Seksi Rekomendasi, di hal 24

2. Satu regu dari Front Line Defenders bertemu dengan seorang di organisasi Arus Pelangi, yang mencakup jaringan dari lebih dari 30 organisasi hak LGBT dan SOGIE di seluruh Indonesia

I. Lebih Bahaya Daripada "Perang Nuklir"

Kebencian Tingkat Tinggi

Pada bulan Maret 2015, badan Ulama Islam terpenting di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa, yang mengatakana tindakan seks sesama jenis harus dihukum dengan cambukan atau hukuman mati. Fatwa ini mengatakana homoseksualitas adalah penyakit yang dapat disembuhkan dan harusnya "dihukum secara keras" tindakan seks sejama jenis. Ini merupakan salah satu pernyataan anti LBGT yang paling keras yang disebarkan oleh sebuah instansi agama di Indonesia di dekade terakhir ini.

Beberapa pembela mengatakan tren di Indonesia yang makin menjadi konservatif di kalangan muslim - yang bertambah kurang toleran terhadap norma-norma tradisional Indonesia, juga terhadap berbagai minoritas etnis dan agama lain - telah membuat bertambahnya kejadian ucapan-ucapan anti LBGT yang diserukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Pada bulan Januari 2016, berbagai rentetan komen anti LBGT yang diucapkan oleh beberapa orang Menteri dan pejabat negara lainnya, serupa dan mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini. Dan komen-komen inilah, menurut para pembela HAM, yang menjadi titik awal kejadian-kejadian kekerasan, yang sudah berlangsung selama 18 bulan, berupa penangkapan masal, cambukan, pemberantasan oleh polisi dan berbagai serangan terhadap pembela-pembela hak SOGIE. Para pembela HAM juga memberitakan mengenai berbagai debat politik, yang berhubungan dengan persiapan pemilihan, yang menggunakan retorika anti LBGT agar mendapat dukungan dari kalangan masyarakat yang makin konservatif, setaraf di masa lampau yang telah dilakukan terhadap minoritas-minoritas Kristen dan keturunan Cina yang diserang demi kemenangan politik.

"Kelompok-kelompok minoritas selalu diserang di negara kita", dijelaskan oleh seorang wanita pembela HAM di Jakarta. "Tetapi bedanya dengan kelompok minoritas Kristen atau keturunan Cina, kaum LBGT di Indonesia tidak mempunyai landasan ekonomi atau politik. Maka kami lebih mudah ditarget dalam permainan politik, dan hal itu juga membuat kami lebih lemah".

Pada tanggal 24 Januari 2016, Menteri Penyelidikan, Teknologi dan Perguruan Tinggi Muhamad Nasir, menyatakan rencananya untuk melarang adanya organisasi mahasiswa LBGT di dalam kampus universitas. Dan terjadi sudah, sebuah kelompok mahasiswa di Universitas Indonesia di Jakarta yang menyelenggarakan berbagai diskusi perguruan mengenai gender dan seksualitas, belakangan ini disorot oleh media sewaktu flyers disebarkan di seluruh kota yang melecehkan pekerjaan mereka. Menteri Muhamad Nasir bahkan mengatakan organisasi mahasiswa serupa itu "melanggar norma dan moral Indonesia".

Seorang mahasiswa aktivis dan mantan kepala kelompok ini mengatakan kepada regu Front Line Defenders: "Pada awalnya kami tidak bisa percaya bahwa pemerintah memperhatikan pembicaraan sebuah kelompok kecil yang diadakan di sebuah ruang kecil di kampus. Akan tetapi kami mulai sadar pembicaraan kami menakutkan mereka, karena memberi dorongan untuk membaca lebih lanjut dan berfikir mengenai topik gender dan seksualitas, hal yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang Indonesia. Padahal untuk kami ini berdasarkan penambahan pengetahuan bagi kami, dan inilah yang dirasakan sebagai ancaman. Sejak itulah mulailah tindakan pemberantasan."



Pada awalnya kami tidak bisa percaya bahwa pemerintah memperhatikan pembicaraan sebuah kelompok kecil yang diadakan di sebuah ruang kecil di kampus. Akan tetapi kami mulai sadar pembicaraan kami menakutkan mereka, karena memberi dorongan untuk membaca lebih lanjut dan berfikir mengenai topik gender dan seksualitas, hal yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang Indonesia. **Padahal ini berdasarkan penambahan pengetahuan bagi kami, dan inilah yang dirasakan sebagai ancaman. Sejak itulah mulailah tindakan pemberantasan.**



Pada bulan-bulan berikutnya, berbagai serangan tingkat tinggi ditujukan pada hak-hak LGBT dan gerakannya. Wakil Presiden Jusuf Kala meminta agar Program Pembangunan dari Persatuan Bangsa-Bangsa menghentikan dukungan finansialnya terhadap kelompok-kelompok hak LGBT. Demikain juga berbagai organisasi internasional lainnya ditekan agar menghentikan proyek-proyek yang berhubungan dengan hak-hak SOGIE. Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak Nasional menghapus semua program, penyiaran dan meniadakan semua bahan yang menggambarkan orang-orang LGBT sebagai orang yang 'normal'. Perhimpunan Psikiater Indonesia menggolongkan identitas LGBT sebagai sebuah 'penyakit jiwa' yang perlu disembuhkan. Berbagai Klinik Kesehatan Wanita didatangkan oleh tokoh-tokoh politik yang memberi ceramah mengenai bahayanya membiarkan anak-anak 'menjadi gay'.

Berbagai organisasi biasa mulai menyerukan suara agar aktivitas SOGIE harus dilarang secara hukum, termasuk dari organisasi Nahdhatul Ulama (NU), organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Organisasi ini juga menganjurkan 'rehabilitasi' paksa orang-orang LGBT. Padahal organisasi Nahdhatul Ulama ini sebelumnya telah menerima bantuan dari Global Fund untuk menjalankan program-program HIV/AIDS, termasuk pemberian pelayanan pada kaum Waria dan kaum MSM ('Men who have Sex with Men' = Lelaki yang bersetubuh dengan lelaki).

Pada bulan Pebruari 2016, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa menurut dia, kegiatan LGBT lebih berbahaya daripada sebuah bom nuklir:

"Ini bahaya karena kita tidak dapat melihat siapa musuh kita, tiba-tiba semua orang dicuci otak. Kini komunitas (LGBT) menuntut lebih banyak kebebasan. Itu benar-benar ancaman... Pada sebuah perang proxy, negara lain mungkin telah menguasai pikiran bangsa tanpa [kita] sadari. Dalam perang nuklir, jika sebuah bom dijatuhkan di atas Jakarta, Semarang tidak akan terpengaruh. Tapi dalam perang proxy, semua yang kita tahu bisa hilang dalam sekejap. Itu berbahaya."

Hukum Syariah dan Cambukan di Aceh

Propinsi Aceh diberi otonomi dari pemerintah Indonesia pada tahun 2001, sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan pergejolakan separatis yang sudah berlalu selama berwindu-windu. Dengan berlakunya Hukum Luar Biasa Otonomi pada tahun 2001, maka Polisi Syariah dan Pengadilan Islam telah memperkuat berbagai peraturan syariah samping. Penyapuan ('sweeping'), pemberantasan, penangkapan yang berkenaan dengan pelanggaran Hukum Syariah menjadi lumrah.

Pemerintah propinsi Aceh mengeluarkan dua peraturan hukum samping baru pada bulan September 2014 yang memberi hukuman pada yang disebut tindakan 'kriminal' yang padahal tidak ada di dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Peraturan-peraturan hukum samping ini membuat hubungan seksual di luar perkawinan dan hubungan seks sesama jenis yang saling setuju menjadi tindakan-tindakan kriminal. Maka Undang-Undang Hukum Pidana propinsi Aceh sekarang memperkenan hukuman hingga 200 cambukan pada tindakan hubungan seksual antara sesama jenis atau di luar perkawinan, perjudian dan penjualan alkohol. Lebih dari 200 orang telah dikenakan hukuman cambuk di antara tahun 2015 dan 2016. Pada bulan Maret 2017, dua orang lelaki ditangkap dan dituduh melakukan hubungan seksual antara sesama jenis yang saling setuju, sesuai yang tertera di dalam Undang-Undang Hukum Pidana Islam propinsi Aceh. Pengadilan Syariah Banda Aceh lalu menjatuhkan hukuman 85 cambukan pada masing-masing orang yang dinyatakan bersalah ini, yang lalu dikurangi karena telah dipenjara selama dua bulan. Ini adalah kasus penjatuhan hukum cambuk pertama yang berhubungan dengan tuduhan tindakan homoseksual, yang dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak merupakan tindakan pidana.

Hukuman cambukan kebanyakan dilakukan di depan umum, yang menarik banyak penonton, yang juga mengambil foto dan video, yang lalu disebarluaskan di media sosial. Sebuah hukuman cambuk di Aceh pada tahun 2016 disiarkan secara 'live' melalui Facebook. Para pembela HAM melaporkan bertambahnya risiko bagi para korban maupun orang-orang yang bekerja untuk membela mereka jika video-video macam ini lalu disebarluaskan. Setelah kejadian ini, di Aceh telah terpilih gubernur baru, yang menjanjikan akan mengubah hukum ini - bukan dalam arti meniadakan hukuman cambuk, tetapi hanya memindahkan hukuman ini ke dalam ruang tertutup.

Pada bulan Juni dan Nopember 2016, pemerintah Indonesia telah menolak resolusi Dewan Hak Asasi Manusia di PBB dan pada Sidang Umum PBB untuk diutuskan seorang Ahli Mandiri untuk menyidik tentang pelanggaran, kekerasan dan diskriminasi terhadap hak-hak SOGIE.

Semua komen dan aksi yang disebut di atas merupakan perubahan drastis posisi pemerintah Indonesia mengenai hak-hak SOGIE. Padahal sewindu sebelumnya, Indonesia menjadi tuan rumah untuk pembicaraan yang dilakukan di tingkat internasional oleh para ahli hukum, yang diselenggarakan di Yogyakarta, mengenai penerapan hukum internasional sehubungan dengan hak-hak SOGIE. Walaupun bukan pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan pertemuan ini, tetap telah diterbitkan oleh kelompok kerja ini yang disebut 'the Yogyakarta Principles', yang terkenal sebagai panduan-panduan yang paling kritis yang menaruh tanggung jawab pada Negara untuk menerapkan hukum-hukum internasional yang dianutnya agar menegakkan hak-hak SOGIE.

Omong Kosong & Kambing Hitam

Pada bulan Oktober 2016, setelah terjadinya retorika anti LGBT secara konsisten di tingkat atas selama hampir delapan bulan dan dilakukan berbagai perubahan kebijakan, Presiden Joko Widodo mengucapkan kata-kata yang mengatakan tidak setuju dengan serangan-serangan ini. Kepada BBC dikatakannya "tidak boleh terdapat diskriminasi terhadap siapa pun". Akan tetapi ia membisu di media nasional mengenai serangan-serangan ini. Para pembela HAM berpendapat bahwa ucapan-ucapannya yang tidak jelas sama sekali tidak senada dengan bertambah kerasnya serangan-serangan dan juga adanya beberapa menteri dari pemerintahnya sendiri yang mengucapkan kata-kata yang paling mengandung kekerasan dan yang mengacu kebencian kepada kaum LGBT.

Posisi berlawanan antara komen-komen yang kelihatan toleran dan kegagalan total untuk melindungi para aktivis dari serangan juga diperlihatkan pada tingkat daerah. Di Yogyakarta, para ekstremis muslim telah meningkatkan serangan-serangan mereka terhadap kaum LGBT dan menargetkan para pembela hak SOGIE. Di lain pihak, Sultan Hamengkubuwono X dan keluarganya menyatakan berkali-kali dukungan mereka pada kaum LGBT, tetapi dalam kenyataannya, kelompok-kelompok ekstremis dibiarkan saja menyerang berbagai event yang diadakan oleh pembela hak SOGIE, yang telah meminta perlindungan pada polisi yang tidak dijawabnya.

Para pembela HAM di berbagai daerah di Indonesia mengatakan kepada Front Line Defenders bahwa kaum LGBT dan pembela-pembela hak SOGIE dijadikan kambing hitam oleh beraneka macam tokoh-tokoh politik untuk menyingkirkan perhatian umum dari skandal-skandal lain - kebanyakan tentang korupsi - ataupun untuk mendapatkan suara. Berbagai pembela HAM mengemukakan adanya hubungan langsung antara sebuah berita tentang investigasi korupsi yang lalu berkelanjutan dengan sebuah serangan terhadap kaum LGBT.

Kombinasi antara serangan terhadap kaum LGBT pada tingkat nasional dari pihak resmi pemerintah di satu pihak, dan di lain pihak, pada arena internasional mengemukakan rasa toleransinya, dan juga melalaikan pemberian perlindungan pada para pembela SOGIE yang diancam, menggarisbawahi kegagalan negara dalam menghadapi secara signifikan ancaman-ancaman terhadap para pembela HAM dan masyarakat yang dibelainya. Dan hal ini, menurut para pembela HAM, telah memperkuat niat dan menambah keberanian orang-orang yang mengancam mereka.

II. Penggeladahan dan Penyerangan

Para pembela HAM di berbagai daerah di Indonesia memberitakan pada Front Line Defenders bahwa kalau ada sebuah retorika yang mengandung kekerasan dilontarkan, maka dengan cepat mengakibatkan peningkatan nyata berbagai ancaman dan serangan fisik dari pihak kelompok-kelompok ekstremis. Di ke-empat kota yang dikunjungi oleh Front Line Defenders, para aktivis dan pembela HAM menyatakan telah terjadi serangan atau penggeledahan pada paling sedikit satu event yang diselenggarakan oleh masyarakat LGBT di tahun 2016, ataupun orang-orang yang berpartisipasi diintimidasi oleh anggota kelompok ekstremis, yang sering membawa senjata.

Dengan meningkatnya serangan dan ancaman, sedangkan dari segi pemerintah maupun polisi kelihatan ketidaksiadaan mereka melindungi kelompok-kelompok LGBT yang berisiko, menurut para pembela HAM, mengakibatkan para ekstremis tambah berani dan merasa lebih bisa meneruskan serangan-serangannya.

Seorang pembela hak SOGIE di Yogyakarta, bernama Tama, mengatakan pada regu Front Line Defenders:

"Kami sudah tahu sebelumnya bahwa event kami akan diserang - para ekstremis telah menilpun kami dan menyatakan rencananya akan menyerang kita. Kita memberitahukan kepada polisi hal ini sebelum berlangsungnya event, tetapi mereka tidak mau datang. Kami menilpunnya pada waktu event berlangsung, tetap mereka tidak mau datang. Maka beberapa di antara kami (pembela-pembela HAM) mengambil posisi di antara para penyerang dan teman-teman kami. Pasukan polisi datang pada akhir-akhir kejadian dan hanya melihat bagaimana kami dipukul."

a. Serangan-serangan Ekstremis

Regu Front Line Defenders meninjau ke empat kantor organisasi yang aktif membela hak-hak gender dan seksualitas. Tiga di antaranya dalam kurun waktu dua tahun terakhir terpaksa sudah berpindah lokasi, disebabkan penggeledahan atau intimidasi dari pihak kelompok-kelompok ekstremis maupun polisi. Kebanyakan dari pembela SOGIE dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sekarang cenderung memilih tempat di luar kantor mereka untuk melakukan pertemuan, apa itu pertemuan antara mereka, dengan masyarakatnya ataupun dengan organisasi internasional lainnya. Para pembela HAM menyatakan bahwa perpindahan ini mengakibatkan berbagai masalah, termasuk kurang mudah dihubungi oleh masyarakat yang mereka harus layani. Salah satu dari organisasi yang ditemukan Front Line Defenders menyatakan merasa menjadi kurang berpengetahuan dan kurang berhubungan dengan komunitasnya setelah berpindah, sedangkan satu organisasi lain telah memilih lokasi yang lebih dekat pada Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum lain, untuk menghindari terjadi penggeledahan atau intimidasi polisi lagi.



Testimony: Yuli, Jakarta

"Pada bulan Februari (2016) kami menyelenggarakan training 'Akses pada Keadilan' yang dibubarkan oleh polisi karena diterima keluhan dan dorongan dari kelompok-kelompok muslim militan. Pada waktu itu kami ber-25 di sebuah ruang konferensi di sebuah hotel, tempat kami menyelenggarakan training ini, tiba-tiba 9 orang anggota sebuah kelompok ekstremis masuk dan mulai mengancam kami. Dalam beberapa menit kemudian lebih dari 40 orang polisi masuk - kami tidak pernah menilpun mereka, kelihatannya mereka sudah berencana demikian. Terpaksa kami secepat mungkin harus berpindah dengan semua partisipan ke hotel yang lain."





Pembela hak transgender Ibu Shinta sedang membaca Al Qur'an di sekolah Islam untuk murid-murid transgender yang berlokasi di rumahnya di Yogyakarta. Sebelumnya polisi telah memberantas secara keras tempat sekolah sebelumnya pada tahun 2016, yang lalu harus ditutupnya, akan tetapi Ibu Shinta bersikeras dan membuka rumahnya untuk pelajaran Islam dan bersembahyang. *Photo: Front Line Defenders*

Kesaksian: Agustine, di Jakarta

Agustine adalah seorang pembela hak SOGIE dan Direktur Eksekutif dari Adhanary Institute, sebuah lembaga advokasi hak-hak lesbian, biseksual dan transgender perempuan. Agustine menceritakan pada Front Line Defenders bahwa organisasinya terpaksa sudah harus berpindah beberapa kali sejak tahun 2010, disebabkan berbagai ancaman dan intimidasi dari kelompok-kelompok ekstremis. Pada tahun 2016, kantornya dipindahkan lagi di dalam sebuah bangunan yang sekarang dikelilingi berbagai organisasi bantuan hukum dan LSM lainnya, agar mendapat dukungan jikalau diserang lagi. Adhanary Institute tidak lagi mencantumkan alamatnya, dengan akibat berkurang kemampuannya dihubungi untuk menolong orang dalam keadaan darurat.



b. Kekerasan Polisi

Polisi bukan saja menolak menjawab panggilan pertolongan dari pihak pembela HAM sewaktu diadakan pertemuan hak-hak SOGIE yang mendapat ancaman atau serangan, bahkan dari pihak polisi sendiri, di berbagai daerah di Indonesia, juga telah terjadi pelecehan, pemberantasan dan para pembela HAM yang berkecimpung bekerja untuk pembelaan hak-hak SOGIE ditangkap. Pada waktu pemberantasan oleh pihak polisi pada yang disebut 'perkumpulan' di tahun 2016 dan 2017, oleh polisi seringkali para aktivis yang hadir disasar dengan ucapan-ucapan kebencian dan ancaman.

Pada bulan Juli 2016, di pelabuhan Makasar, polisi setempat telah melakukan 'sweeping' dan menangkap lebih dari 10 orang yang diidentifikasi sebagai LGBT. Beberapa pembela HAM dari lembaga Sehati mendatangi diri ke kantor polisi untuk berusaha melepaskan orang-orang yang ditangkap. Polisi di tempat menolak untuk berdiskusi dengan para pembela HAM, bahkan dipanggilnya pejabat-pejabat lain ke dalam ruang dan diejek-ejek dan dicaci-makinya pembela-pembela HAM ini. "Mereka mengundang semua orang masuk ke dalam ruang dan kami difoto, dan ucapan-ucapan penghinaan diujar mengenai penampilan dan ekspresi gender kami", diingat oleh pembela HAM Booboo. Para pejabat lalu mulai menyebut batas-batas mengenai identitas gender dan ekspresi mana saja yang dapat dan yang tidak dapat diterima di kehidupan umum di Makasar, dengan menggunakan para pembela HAM sebagai bahan, menunjuk-nunjuk pada para pembela HAM sebagai contoh. Seorang pejabat mengatakan, bahwa transgender perempuan seharusnya "tidak boleh nampak di kalangan umum", akan tetapi transgender lelaki, atau orang-orang yang diidentifikasi sebagai wanita yang berekspresi gender maskulin, masih "diperkenankan". Kepala polisi dari Polisi Santri menunjuk kepada Booboo, seorang transgender lelaki dengan ekspresi gender maskulin, dan mengatakan: "Ini tidak apa-apa. Tetapi transgender perempuan tidak diperkenankan."

Pada bulan April 2017, aparat kepolisian telah menggeladahkan sebuah hotel di Surabaya dengan alasan terdapat sebuah 'sex party' dan menahan orang-orang yang hadir. Lalu para pembela HAM yang datang ke kantor untuk advokasi hak-hak orang yang ditahan diancamnya. Aparat polisi memaksa 14 orang lelaki yang ditahannya untuk melakukan tes HIV, yang lalu diterbitkan hasil-hasilnya, sebuah taktik yang lalu ditiru di tempat-tempat lain di Indonesia, menurut pembela HAM. Sebulan kemudian, pada bulan Mei 2017, di Jakarta, 141 orang lelaki ditangkap polisi di sebuah sauna, dengan tuduhan telah turut dalam 'jaringan pelacuran gay'. Di Jawa-Barat, propinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia, otoritas mengumumkan akan membuat pasukan khusus anti LGBT, yang diduga oleh para pembela HAM akan digunakan untuk melacak para pengacara dan aktivis yang membela kasus-kasus orang-orang yang ditangkap pada penggeladahan.

Di propinsi Aceh, polisi syariah telah mengadakan 'sweeping' setiap hari Jumat, dengan melecehkan dan menahan orang-orang yang dianggapinya melanggar peraturan-peraturan propinsi setempat yang sangat konservatif. Hal ini mempersulit kemampuan para pembela HAM untuk menemui para korban atau anggota-anggota masyarakat yang perlu dibantu secara pribadi.

Aparat kepolisian juga telah mentarget secara khusus para pembela HAM, di tempat mereka bekerja dan di rumah mereka, melakukan penggeladahan dan menginterogasi mereka mengenai pekerjaan mereka. Para pembela HAM telah melaporkan bahwa mereka sendiri, pasangan mereka maupun keluarga mereka telah dipukul, disiksa dan diperkosa pada waktu ditahan, dalam upaya intimidasi agar mereka berhenti pekerjaan mereka.

Kesaksian: Hartoyo, di Aceh dan Jakarta

Hartoyo adalah seorang pembela hak SOGIE dari Aceh dan pendiri lembaga OurVoice di Jakarta. Dari tempat kelahirannya di Aceh, Hartoyo pindah ke Jakarta pada tahun 2007, setelah sebuah kelompok lelaki mendobrak apartemennya yang dihuninya dengan partnernya seorang lelaki, lalu mereka diserang. Salah satu dari orang penyerang ini menilpun pada polisi syariah setempat, yang lalu datang dan menangkap Hartoyo dan partnernya. Di dalam tahanan polisi mereka dilarang akses pada advokasi, menilpun maupun pergi ke kamar mandi, dan mereka dipukul dan dianiaya secara seksual.

Hartoyo kembali ke Aceh di tahun 2016 pada hari terjadinya hukuman cambuk pada dua orang lelaki, untuk membantu mereka dalam pelayanan medis dan relokasi setelah hukuman berlalu. Orang-orang yang hadir pada tempat hukuman yang dilakukan di depan umum, melaporkan bahwa polisi syariah sedang 'mencari orang yang bernama Hartoyo'. Salah satu pembela HAM menceritakan pada regu Front Line Defenders bahwa "telah tersebar kabar bahwa ia akan kembali ke Aceh untuk menolong kedua korban ini - karena dia yang paling mampu untuk membantu. Akan tetapi polisi syariah terus mengelilingi para hadirin, menanyakan dimana Hartoyo. Mereka sudah dapat info ia kembali."

III. Ancaman dan Pelecehan

a. Ancaman pembunuhan

Di berbagai daerah di Indonesia para pembela HAM melaporkan pada tahun 2017 terdapat peningkatan yang signifikan dari berbagai ancaman, termasuk ancaman pembunuhan, yang lebih ditargetkan secara pribadi.

Regu Front Line Defenders bertemu dengan lebih dari 20 orang pembela HAM, semuanya, kecuali dua, mengatakan telah menerima ancaman pembunuhan sejak awal 2016. Ini berupa ancaman melalui internet, terkadang dengan jumlah ratusan, pada posting blog, status Facebook dan majalah online yang menerbitkan puisi atau tulisan dari para pembela hak SOGIE yang berkenan dengan hak mereka.

Kebanyakan telah menerima berbagai kali ancaman melalui tilpun, khususnya pada malam hari, dengan seruan para pembela akan dibunuh 'di waktu mendatang'.

Ancaman secara lisan juga diucapkan sewaktu terjadi serangan-serangan fisik. Pada suatu kejadian, anggota-anggota dari berbagai kelompok ekstremis menyerang sebuah event LGBT pada tahun 2016 dan mengancam akan menggantung semua pembela dan orang yang hadir pada event itu, hingga terpaksa semua harus melarikan diri sekejap.

Beberapa aktivis melaporkan dibuatkan 'outing' (penyebaran secara umum) mengenai identitas berbagai pembela HAM yang bekerja secara anonim atau diam-diam membela masyarakat mereka, suatu cara khas yang digunakan oleh kelompok-kelompok ekstremis. Dikatakan oleh pembela HAM dari lembaga Arus Pelangi di Jakarta bahwa sejak tahun 2016 paling sedikit 5 orang pembela hak SOGIE telah dievakuasi dari propinsi Aceh setelah foto-foto mereka dan dugaan identitas seksual atau gender mereka diposting di internet dengan seruan menyerang mereka.



Kesaksian: Agustine, di Jakarta

Dari bulan Januari hingga Maret 2017, Agustine, Direktur Eksekutif dari Adhanary Institute, sering sekali ditilpun di malam hari dengan perkataan-perkataan yang mengancam. Orang-orang yang menilpunnya mengatakan tahu dimana ia tinggal, dan mengatakan "darahnya adalah halal". Sebelumnya, sepanjang tahun 2016, ia sering mengeluarkan pendapatnya, mengkritik berbagai pemberantasan yang dilakukan pada masyarakat-masyarakat LGBT yang dimulai sejak tahun 2016, dan ia sering muncul dan disebut namanya di berbagai media lokal dan internasional. Di awal tahun 2017, nomor tilpunnya disebarluaskan online oleh sebuah kelompok ekstremis yang diberikannya dari seorang wartawan, maka suara kritiknya sejak tahun 2016 mengakibatkan ia diancam secara pribadi di tahun 2017.

Pada tahun 2015, Agustine menerbitkan sebuah sajak di Facebook, yang mencela sebuah tweet dari seorang menteri negara yang menyatakan membunuh orang LGBT adalah "halal menurut agama Islam". Sajak itu lalu dilontarkan lagi di sebuah majalah online dan dalam waktu sehari saja bagian komen di bawah sajaknya berisi lebih dari 500 ancaman pembunuhan yang diarahkan kepada Agustine.

"Kata 'bunuh' muncul begitu sering; bunuh, bunuh, bunuh. perkataan seperti: "Kalau saya berhadapan dengannya, akan saya membunuhnya", "Saya akan menyerangnya kalau saya melihatnya". Kita mulai menghitung pada hari pertama - pertama 100, lalu 200, lalu lebih dari 500 komen yang berisi kekerasan. Mula-mula saya merasa sangat takut, dan berfikir tidak akan menulis lagi.... tetapi kalau sudah sampai halaman ke-15 yang berisi penuh dengan ancaman pembunuhan ... yah, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mulai melalaikannya."



Kata 'bunuh' muncul begitu sering;
BUNUH, BUNUH, **BUNUH.**"



Kesaksian: Hartoyo, dari Aceh dan Jakarta

Biarpun sudah sepuluh tahun pindah ke Jakarta, Hartoyo mengatakan tetap masih menerima berbagai ancaman pembunuhan dan pelecehan melalui internet. Keluarganya juga masih menerima berbagai panggilan tilpun yang mengancam, yang memperingatkan mengenai kegiatan aktivis putranya, demikian juga teman-teman dekatnya. Hartoyo menyatakan kepada Front Line Defenders bahwa 'lingkungan kerja yang berbahaya' ini telah mengakibatkan dampak yang besar pada kehidupan pribadinya juga: "Berbagai teman, sejawat, bahkan partner-partner bisnis potensial, telah menjauhinya, karena takut akan ada risiko kalau bergaul dengannya".

"Yang paling saya takutkan adalah kalau ancaman-ancaman kepada keluarga saya dinyatakan. Ancaman yang ditujukan pada saya, yah, sudah pernah diwujudkan. Dan saya cukup yakin akan terjadi lagi serangan secara fisik - karena komen-komen yang dilontarkan sedemikian keras dan menjadi sedemikian lumrah, tidak sulit dibayangkan suatu hari seorang akan melakukannya. Saya sudah menerima keadaan akan dianiaya atau dibunuh dalam upaya melindungi kaum LGBT. Akan tetapi terhadap keluarga saya, saya tidak sudi. Saya berusaha untuk membuat negara ini lebih aman, lebih baik untuk orang-orang 'queer'- tetapi bagaimana kalau menjadi kurang aman untuk keluarga saya?"

Hartoyo mengatakan biarpun menerima ancaman-ancaman berat setiap hari, yang ditujukan kepada pribadinya, keluarganya dan teman-temannya, yang disebabkan oleh pekerjaannya sebagai aktivis, ia tidak melaporkannya kepada polisi. "Kekerasan yang paling berat, yang paling menjijikkan, yang saya alami, telah dilakukan oleh polisi. Kepada siapa saya bisa mengajukan laporan sekarang?"



Kesaksian: Tunggal, di Jakarta

Sebagai seorang pembela hak asasi perempuan, Tunggal, telah menerima berbagai ancaman di Twitter dari akun-akun yang tidak jelas nama maupun gambarnya. Ancaman-ancaman yang diterimanya termasuk pembunuhan, perkosaan dan pernyataan-pernyataan bermakna agama yang mengandung kekerasan, misalnya "Darahmu halal". Tunggal melihat peningkatan berbagai ancaman semacam ini setelah ia membuat posting online mengenai hak-hak SOGIE, dan melaporkan bahwa: "Sejak waktu itu (Juli 2017), setiap posting atau komen yang saya buat mengenai hak LGBT mengakibatkan berbagai kritik yang terbuka dan kasar, seringkali yang mengandung kekerasan, dari kelompok-kelompok konservatif." Juga pernah ada kejadian, orang-orang lelaki, yang dikenal berafiliasi dengan berbagai kelompok ekstremis, datang ke kantornya di Jakarta dan mengintimidasi Tunggal dan pekerja-pekerja lainnya, hingga organisasinya terpaksa menghilangkan logo dan tandanya dari muka bangunan, demi keamanan.

b. Pengawasan

Para pembela HAM, khususnya yang bekerja di Aceh, melaporkan diikuti, biasanya oleh satu atau lebih orang lelaki berkendara motor, sewaktu mereka melakukan perjalanan untuk membantu orang-orang LGBT yang dalam keadaan kritis di kota maupun di luar kota. Para pembela telah melakukan berbagai strategi untuk menghindari hal ini, termasuk mengubah rute perjalanan dan juga mengurangi perjalanan keluar kota. Akan tetapi hal ini sangat mengurangi kemampuan mereka untuk bereaksi pada kejadian-kejadian darurat, serta untuk bertemu dengan anggota-anggota masyarakat mereka yang terancam. Pengurangan pertemuan-pertemuan nyata antara warga tambah mengurangi lagi kesepakatan dan rasa percaya, yang akibatnya menambah rasa tidak aman bagi semua anggota masyarakatnya.

c. Ketidakamanan Sandang dan Pangan

Para pembela HAM yang bekerja mengenai hak-hak SOGIE di berbagai daerah di Indonesia, khususnya transperempuan yang bekerja di bidang seks, melaporkan risiko yang menjadi sangat besar pada persimpangan kegiatan aktivis mereka dengan kegiatan kerja seks mereka. Di Aceh, transperempuan banyak yang bekerja di bidang kecantikan, di salon, yang merupakan kemungkinan pekerjaan dan pendapatan yang lebih aman dibanding pekerjaan seks. Tetapi di bidang inipun, disebabkan berbagai pemberantasan oleh pihak pemerintah, banyak langganan menjadi takut meminta pelayanan dari transperempuan, hingga mereka pun merasa sulit mencari pendapatan. Ditambah lagi, pada bulan Maret 2016, sebuah organisasi Muslim di daerah Bireun telah mengeluarkan pedoman pada salon-salon lokal agar jangan mempekerjakan orang-orang yang beridentifikasi LGBT.

Faisal, Aceh

Faisal adalah seorang pembela hak LGBT di Banda Aceh dan dialah salah satu pemuka dari awal perjuangan untuk membantu kaum LGBT yang terbuka maupun yang tersembunyi.



Ia yang bereaksi dan membantu orang-orang yang diusir dari rumah keluarga mereka, mengakalkan berbagai strategi keamanan bagi orang-orang yang diancam, menjangkau ke daerah-daerah pelosok untuk bertemu kaum LGBT di sana, dan belakangan ini, membantu korban-korban hukuman cambuk agar mendapat asuhan medis.

Pada tahun 2017, setelah polisi syariah setempat melakukan hukuman cambuk kepada dua orang lelaki gay, Faisal berkunjung ke rumah salah satu di antaranya dan menolongnya mendapatkan bantuan medis yang baik. Faisal lalu juga menolongnya pindah mendaftar ke universitas lain agar dapat menyelesaikan perguruannya.

Faisal dan para pembela kaum LGBT lainnya bertemu secara teratur dengan anggota-anggota masyarakatnya, terkadang beberapa kali dalam seminggu, agar memperkuat rasa solider, membicarakan kesulitan-kesulitan berkenaan dengan keluarga dan keamanan, dan membagi pendapat mengenai berbagai strategi untuk menambah keselamatan. Sudah bertahun-tahun Faisal mengalami berbagai ancaman dan pelecehan mengenai pekerjaannya sebagai pembela kaum LGBT. Pada tahun 2016, waktu ia sedang berangkat dari sebuah pertemuan LGBT di Jakarta, ia diancam akan digantung oleh pendukung-pendukung Front Pembela Islam (FPI).

Lembaga Arus Pelangi juga telah menerima berbagai laporan dari seluruh Indonesia dari berbagai organisasi pembela hak transgender dan transperempuan yang menyatakan mendapat kesulitan mencari tempat tinggal ataupun tempat bekerja yang disebabkan identitas dan ekspresi gender mereka. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka hidup dan bekerja secara tentram dan aman. Di berbagai daerah di Indonesia didapatkan peningkatan berbagai masalah yang terkait dengan kehilangan tempat tinggal bagi masyarakat dan para aktivis transgender.

d. Ancaman Sewaktu Masa Transisi

Para pembela HAM melaporkan berbagai ancaman yang berhubungan langsung dengan proses transisi ekspresi gender anggota-anggotanya. Mereka ditarget oleh polisi, diawasi dan kemungkinan untuk bertemu secara terbuka dengan warga masyarakatnya dihambat.

Kesaksian: Ines, di Yogyakarta

Ines adalah seorang transperempuan, juga seorang pembela hak asasi perempuan, yang bekerja di bidang seks. Ia telah mendirikan sebuah organisasi pekerja seks pada tahun 2013 yang tidak tercatat resmi. Melalui organisasi ini ia dan teman-teman sejabatnya memperjuangkan berbagai pelayanan yang biasanya tidak diberi kepada pekerja-pekerja seks secara pribadi. Mereka mencari perumahan pemerintah bersama, mengumpulkan pendapatan mereka agar dapat membuktikan 'pendapatan stabil' yang merupakan permintaan standar kebanyakan tuan rumah, serta saling menemani ke rumah sakit agar mendukng secara berkelompok permintaan asuhan medikal. Ines melaporkan seringkali harus 'memilih' antara tidak bekerja agar menjaga keamanannya sebagai seorang aktivis atau bekerja mencari pendapatan untuk biaya makan.

"Saya terpaksa harus bekerja terus, untuk mencari makan secukupnya untuk besok. Kalau saja saya tidak perlu bekerja penuh mencari klien, saya bisa lebih banyak menyisihkan waktu dan pemikiran untuk menolong dan melindungi wanita-wanita lain. Kalau pendapatan saya bisa bertambah sedikit saja, saya akan tetap keluar di jalan, karena di sanalah masyarakat saya, di sanalah saya akan lebih bisa menolong mereka."

Ines berceritera kepada regu Front Line Defenders bahwa selama hampir seluruh jangka waktu 15 tahun sebelum ini, "Saya berpakaian dan bergaya seperti wanita, bermake-up dan berambut panjang". Akan tetapi belakangan ini, karena intimidasi dari polisi, ia terpaksa mengubah gaya pakaiannya. Ines adalah seorang transperempuan yang sebelumnya mengenakan pakaian sehari-hari pun yang komplit sebagai wanita, cara berpakaian yang sama ini dikenakannya pada rapat-rapat advokasi dan pengorganisasian pada siang hari dan pada melakukan pekerjaan seksnya di malam hari. Tetapi karena di daerah Yogyakarta ia mulai menjadi terkenal sebagai pembela, maka polisi mulai mengikutinya secara khusus di malam hari. Di tahun 2016, ia ditahan dan dipenjara semalaman. Dari pihak polisi dikatakan ia ditahan karena pekerjaannya sebagai pekerja seks, tetapi menurut Ines dan para pembela HAM lainnya di Yogyakarta, ia ditarget polisi jelas bergantung karena kegiatan aktivisnya.

"Karena saya rupanya sama pada waktu ada kegiatan aktivis di siang hari dan waktu bekerja di jalan di malam hari, maka polisi mudah sekali mengenali saya di antara transperempuan-transperempuan lain. Maka saya difoto dan ditarget, lalu diikuti selama berbulan-bulan. Lalu saya ditangkap."

Ines mengatakan kepada Front Line Defenders bahwa karena "... saya berpakaian yang sama sebagai pembela HAM di siang hari dan waktu bekerja di jalan di malam hari, maka saya lebih mudah ditangkap". Maka, pada tahun 2016, supaya mencela penangkapan polisi, dipangkas rambutnya dan mulailah ia mengenakan pakaian lelaki pada siang hari, dan baru di malam hari mengenakan pakaian wanita lagi. Menurut Ines "membagi diri menjadi dua orang" adalah tindakan terpaksa yang diambilnya demi keamanan sebagai seorang pembela HAM.

Di lingkungan pekerja seks ada yang mengerti dan menerima pengorbanannya ini demi keamanan, tetapi beberapa di antaranya secara terbuka mengkritik penampilannya sebagai seorang lelaki di siang hari. Ada yang mulai mengatakannya ia seorang 'lelaki gay' dan mengatakan dia tidak mewakili lagi kaum trans.

"Saya berbuat demikian agar bisa 'survive'. Demi keamanan. Tetapi ada orang yang menjadi benci kepada saya."

Kesaksian: Rais, di Aceh

Rais adalah seorang yang baru bertransisi menjadi translelaki, juga seorang pembela HAM. Ia membantu kaum LGBT dan pembela-pembela HAM lainnya untuk membuat berbagai strategi keamanan yang cocok, sesuai dengan ekspresi gender masing-masing, juga dengan melihat lingkungan daerah Aceh yang berisiko tinggi. Sebagai seorang trans yang berpindah gender perempuan ke lelaki, Rais telah menerima berbagai ancaman, intimidasi dan risiko dalam proses perubahannya.

Pada tahap awal transisinya, waktu suaranya masih 'lebih feminin', ia tidak berani berbicara di depan umum, karena takut memperlihatkan identitas transgendernya, maka pekerjaannya sebagai pembela terhambat. Ia mengemukakan pada Front Line Defenders bahwa ia berkesulitan bertemu dengan kaum LGBT yang memerlukan bantuannya, karena kalau ia kelihatan bersama dengan seorang wanita, mereka bisa dituduh sebagai pasangan heteroseksual yang tidak menikah dan bisa dituduh oleh polisi syariah. Lalu kalau ia berbicara dengan polisi, suaranya memperketahuinya sebagai seorang wanita, lalu ia diancam akan ditangkap karena tidak mengenakan krudung. Di jalan orang-orang juga melecehkannya, mengatakan: "Kamu perempuan, kamu harus mengenakan krudung kalau jalan di jalan. Kamu akan dihukum oleh polisi".

Rais sering dianggap seorang lelaki gay dan sering dilecehkan dan diancam dengan perkataan-perkataan yang biasanya ditujukan kepada kaum gay. Khususnya kaum gay di Aceh berada dalam keadaan berisiko, setelah dilakukan hukuman cambuk pertama pada lelaki gay di tahun 2017.

Apapun gender yang dianggap orang luar terhadap seorang aktivis, akan selalu berbahaya dan membatasi kemampuannya untuk bertemu dengan orang-orang secara nyata, misalnya untuk berbicara mengenai keamanan, padahal kemampuannya berkomunikasi sendiri menjadi tidak aman. Juga menghambat kemampuannya untuk menolong kalau ada keadaan darurat, karena Rais merasa tidak aman dari pelecehan polisi kalau melakukan perjalanan atau bekerja di tempat umum.

"Polisi syariah seolah tidak bisa menentukan bagaimana dan untuk alasan apa menuduh saya. Pernah terjadi, sebelum saya berobat hormon untuk memberatkan suara saya, saya berada di sebuah taman umum dengan seorang rekan untuk membicarakan soal pekerjaan kami. Karena saya berpakaian seperti ini (celana panjang dan kemeja) polisi syariah mendatangi kami dan mulai mengancam kami - mereka berfikir kami sebuah pasang heteroseksual yang tidak menikah. Akan tetapi waktu saya berbicara, mereka mendengar suara feminin saya. Lalu saya diancam tidak mengenakan krudung. Dan sejak hari itu saya disasar oleh polisi syariah."

IV. Akibat

Ancaman-ancaman dan serangan-serangan yang makin meningkat mengakibatkan para pembela hak SOGIE harus menyisihkan waktu dan biaya untuk perlindungan. Maka akibatnya, berbagai kegiatan advokasi terpotong, dan masyarakat yang diladeninya kekurangan orang dan dana, padahal pada jaman kini yang makin diperlukannya. Ditambah lagi, para pembela HAM dipaksa untuk berpindah lokasi dan menarik dirinya dari permukaan umum. Ini mengakibatkan para pembela HAM kurang mudah dijangkau oleh masyarakatnya, yang pada gilirannya lagi menurunkan kepercayaan kepadanya. Bahkan, padahal keperluan perlindungan makin bertambah pada masyarakat LGBT, para pembela HAM justru mulai disalahkan mengenai keadaan jaman sekarang dan bertambahnya segala macam kesulitan yang berhubungan dengan berbagai tindakan keamanan.

a. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat

Dengan bertambahnya kekerasan terhadap masyarakat LGBT di tahun-tahun 2016 dan 2017, anggota-anggota masyarakat ini bertolak pada para pembela hak SOGIE, kuatir menanyakan mengenai keselamatannya kalau berpartisipasi dalam sebuah event atau kegiatan lain. Akan tetapi karena dari pihak pemerintah tidak diberikan perlindungan dari serangan-serangan kelompok ekstremis, bahkan diserang oleh pasukan polisi itu sendiri, maka dari pihak para pembela menjadi sangat sulit, hampir tidak mungkin, memberikan garansi ini. Bagaimana menjawab pertanyaan anggota: "Bisakah menggaransi keamanan kita kalau kita datang hari ini?"

Sekaligus, para pembela HAM mendapat kritik dari masyarakatnya karena berbagai macam tindakan baru harus diberlakukan untuk menjaga keamanan dan ranat privasi - sebagai contoh: ada semacam pengamanan yang harus memberi konfirmasi dengan kode kriptogram dengan sebuah aplikasi (tilpun atau komputer) - maka orang-orang yang sebelumnya bisa datang pada pertemuan, sekarang mengatakan menjadi terlalu rumit.

Maka hasilnya, di berbagai daerah, warga yang menghadiri berbagai event mengenai hak SOGIE berkurang, yang disebabkan mereka tidak merasa aman atau merasa tindakan-tindakan keamanan menjadi terlalu rumit.

Ketidakadaan perlindungan dari pihak pemerintah telah merugikan para pembela HAM, bukan saja dalam hal waktu dan energi yang hilang untuk menjaga keamanan, hingga berkurangnya kemampuan untuk advokasi, tetapi juga telah mengubah dinamika antara para pembela dengan masyarakatnya.

Di Makasar, pembela-pembela dari lembaga Sehati mengatakan karena tidak didapatkannya perlindungan dari pihak pemerintah dari ancaman-ancaman yang dikenal sumbernya dan yang dilaporkan telah terjadi, maka mengakibatkan para pembela yang disalahkan seolah mereka telah 'mengundang' serangan-serangan ini. Adalah suatu kejadian nyata belakangan ini. Pada suatu saat, diadakan event untuk transperempuan di Soppeng, yang diserang segerombolan orang dengan menimpa botol-botol pada para perempuan yang hadir dan yang tidak mendapatkan perlindungan dari polisi. Maka lalu berbagai warga masyarakatnya mengatakan kepada beberapa pembela bahwa "kalian selalu membawa malapetaka bagi kami" dan "kalian terlalu bersuara", kedua kritik ini tidak pernah didengarnya dari masyarakatnya sebelum tahun 2016.

Seperti dijelaskan seorang pembela di Makasar: "Kita mengadakan event yang sama sejak bertahun-tahun. Yang berbeda adalah kekerasan yang ada sekarang. Karena pihak pemerintah menolak melindungi kami, maka kesalahannya hanya bisa ditujukan pada kami. Tentulah kami yang disalahkan."

Ada yang menyebutkannya sebagai 'pemberantasan kedua', banyak yang mengutarakan kepada regu Front Line Defenders bahwa kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya dan dipersalahkan para pembela dirasakan lebih berat secara emosional dan psikis dibanding serangan-serangan secara fisik yang dialami pada tahun 2016.



Para pembela hak asasi manusia bertemu dengan regu Front Line Defenders di Makasar

Photo: Front Line Defenders

Kesaksian: Santaru, di Makasar

Santaru adalah seorang pemuka pembela hak-hak SOGIE dan kepala lembaga Sehati, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi dan perkembangan gerakan masyarakat-masyarakat 'queer' di Makasar. Santaru berceritera kepada Front Line Defenders bahwa berbanjirnya berbagai tindakan dan retorika anti LGBT dari para pejabat telah mengakibatkan rasa tegang antara para pembela dan komunitasnya, serta warga komunitasnya merasa tidak aman lagi dalam pertemuan.

Setelah terjadinya hukuman cambuk di tahun 2017 di Aceh, para pembela HAM di Makasar mulai berencana menyelenggarakan pertemuan tahunan mereka untuk warga di daerah mereka. Dan untuk pertama kalinya, warga masyarakatnya mengontak para pembela dan menanyakan "apakah seksi penyelenggara dapat memberi garansi perlindungan bagi semua orang" jika terdapat serangan. Karena serangan kekerasan terhadap warga LGBT seringkali dilakukan justru oleh pihak pemerintah atau polisi sendiri, para pembela yang berusaha menyelenggarakan event ini melaporkan "berkesulitan memberi jawaban yang positif" pada warga mereka yang ingin dijawabnya rasa ketakutan mereka.

b. Menyensor diri

Kebanyakan para pembela HAM yang ditemui oleh Front Line Defenders di berbagai daerah di Indonesia melaporkan telah melakukan sensor terhadap diri sendiri di internet dan di hadapan umum, disebabkan tidak adanya perlindungan dari pihak pemerintah kalau terdapat ancaman atau serangan. Hal ini meliputi perubahan ucapan-ucapan mereka, menghindari kata-kata berisi unsur hak (dijadikan ucapan yang lebih berkenaan dengan kesehatan atau perkembangan), memutuskan tali perhubungan dengan kelompok-kelompok masyarakatnya, serta mengurangi waktu di tempat-tempat umum. Para pembela menjelaskan hal ini mengakibatkan mereka menjadi kurang hadir kalau diperlukan dukungan pada warga masyarakatnya, dan di seluruh Indonesia telah mengakibatkan pembekuan kedaulatan hak-hak SOGIE, yang padahal sebelumnya sangat berkembang.

Kesaksian: Tunggal, di Jakarta

Sejak terjadinya pemberantasan di tahun 2016, Tunggal menyensor diri posting-posting onlinenya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, karena takut akan diserang dirinya pribadi, rekan-rekannya maupun keluarganya. Dia melaporkan sekarang juga mengurangi kritik-kritik terhadap kelompok-kelompok ekstremis, tidak lagi menyebutkan orang secara individual atau menyebut secara terperinci tentang tindakan-tindakan kekerasan dan intimidasi yang diujarkan terhadap masyarakat yang ia layani.

"Saya merasa orang-orang itu memancing ucapan-ucapan saya. Sebelum tahun 2016, saya seorang aktivis yang sangat aktif sepenuhnya. Saya mengkritik langsung secara terbuka serta tajam berbagai kelompok agama konservatif. Sekarang saya berhati-hati memilih kata, karena saya tahu dapat digunakan untuk menentang saya."

c. Burn-out & Pengurangan kapasitas

Akibat dari kekerasan anti LGBT, adalah makin berkurangnya aktivis yang berani menyelenggarakan dan berpartisipasi secara terbuka berbagai pertemuan atau event. Maka "beban semakin tinggi yang harus ditanggulangi semakin sedikit jumlah pembela HAM", penjelasan seorang pembela, yang menghasilkan para aktivis yang masih bekerja makin merasakan kecapaian secara fisik maupun psikis. Bahkan terkadang para pembela melaporkan ketidaksanggupannya mentaati semua tindakan pengamanan yang dianjurkan oleh rekan-rekannya dan para penasehat keamanan.

Kesaksian: Rais, Aceh

Pembela HAM dan translelaki Rais mengurangi kegiatan aktivisnya online setelah terjadi berbagai penggeladahan dan ancaman-ancaman yang ia terima di media sosial, yang mengancamnya akan melaporkannya ke polisi syariah mengenai kegiatannya sebagai aktivis. Sekarang ia jarang berinteraksi di berbagai forum media sosial transgender dan 'queer', yang sebelumnya adalah salah satu cara terpenting bagi kaum beridentitas LGBT di Aceh untuk berhubungan dengannya untuk mencari dukungan. Juga risiko yang ia alami mengenai persepsi gendernya telah menghasilkan berkurangnya kemampuannya bertemu langsung perorangan untuk membicarakan strategi perlindungan atau kalau diperlukan secara darurat.

Kesaksian: Tunggal, Jakarta

Tunggal, sebagai seorang pembela HAM perempuan yang berpengalaman bekerja dengan berbagai organisasi internasional, maka ia sangat berpengetahuan bagaimana dapat memberi pertolongan untuk pengamanan. Ia mendapat laporan dari para rekannya, pembela HAM juga, makin berkurang kemampuan mereka bertahan melakukan berbagai tindakan pengamanan yang ia anjurkan. Menurut Tunggal rasa 'burn-out' dan rasa bersalah adalah faktor-faktor utama yang membuat para pembela HAM ini melalaikan menerapkan tindakan-tindakan keamanan. Selain ini, di daerah-daerah pelosok yang ia kunjungi, faktor bahasa dan kemampuan membaca adalah hambatan-hambatan lain yang ditemuinya agar warga masyarakatnya mendapatkan dukungan yang diperlukan.

"Para aktivis yang bekerjasama dengan saya, begitu tertimpa dengan pekerjaan dan permintaan berbagai dukungan dari para korban, hingga mereka sendiri tidak dapat memenuhi semua tindakan keamanan untuk diri mereka sendiri - atau mereka merasa bersalah membuang waktu banyak untuk keamanannya sendiri. Suatu organisasi tidak mempunyai pintu belakang di kantornya, dan berlokasi di kawasan yang sangat padat yang tidak memungkinkan jalan lari kalau terjadi serangan. Organisasi yang lain tidak mempunyai CCTV ('close-circuit television' - sistem monitor dan perekaman) dan setelah saya mendapatkan dukungan pemasangannya, mereka tidak dapat menyisihkan waktu untuk menerapinya."

V. Rekomendasi

Para pembela HAM yang berisiko di Indonesia, yang bekerja dalam bidang hak-hak SOGIE, telah menyebutkan berbagai reformasi yang penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan berbagai tindakan dukungan yang mungkin dapat diberi oleh komunitas internasional - khususnya perwakilan-perwakilan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Uni di Jakarta - agar menambah keamanan mereka.

Rekomendasi kepada pemerintah Indonesia:

- Menghentikan segera semua pernyataan yang memberi stigma pada pekerjaan penting para pembela hak SOGIE dan masyarakatnya yang dilayaninya, serta membatalkan dan menyalahkan secara umum semua pernyataan yang mengutuk mereka yang telah dibuat sebelumnya;
- Menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang telah diterima belum lama ini dari Norwegia dan Irlandia sewaktu Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review - UPR) bulan September 2017, berkenaan dengan perlindungan para pembela LGBT dan non-diskriminasi. Ini termasuk Rekomendasi 141.56, yang memprioritaskan lingkungan yang aman dan memungkinkan untuk semua pembela HAM, termasuk yang mewakili masyarakat-masyarakat LGBT, serta Rekomendasi 141.58 berkenaan dengan hukum-hukum non-diskriminatif;
- Menambah pernyataan-pernyataan secara umum yang menyalahkan kekerasan terhadap masyarakat-masyarakat LGBT dan yang menunjang perlindungan polisi terhadap pembela-pembela hak SOGIE;
- Mengusahakan penyelenggaraan pelatihan di kalangan polisi dan aparat keamanan mengenai pokok-pokok identitas gender dan seksualitas, termasuk secara khusus pada Kesatuan Kekerasan Terhadap Wanita;
- Mengepalai desakan terhadap para pejabat dan para politisi agar menghentikan penerusan penargetan masyarakat LGBT untuk kepentingan politik.

Rekomendasi kepada Uni Eropa dan negara-negara anggota UE:

- Mendesak agar memberi perlindungan kepada pembela-pembela hak SOGIE pada pertemuan umum dan pribadi dengan pejabat-pejabat Indonesia, memperingati ketanggungjawabannya menerapkan semua rekomendasi UPR yang baru-baru ini diterima yang berkenaan dengan perlindungan para pembela SOGIE dan hukum-hukum non-diskriminatif;
- Mengundang pembela-pembela HAM untuk rembukan dengan Delegasi UE dan EUMS (Staf Militer Uni Eropa) yang relevan, serta bertemu dengan para pembela hak SOGIE pada waktu mengadakan perjalanan ke daerah, agar mengetahui mengenai keperluan perlindungan mereka;
- Memberitahukan pembela HAM adanya dukungan dan bantuan darurat dari Uni Eropa, (beasiswa ProtectDefenders.eu, pembiayaan, transportasi, dll.);
- Memberi ruang untuk pertemuan dan event yang aman bagi para pembela hak SOGIE dan organisasi-organisasi lain yang berada di luar Jakarta;
- Membuat protokol follow-up dengan para pembela HAM yang telah ditemui oleh perwakilan UE dan negara-negara anggotanya, agar para pembela lebih mengetahui mengenai berbagai usaha advokasi yang berlangsung, khususnya yang berkenaan dengan berbagai tujuan spesifik HAM, seperti penerapan UPR;
- Mengundang para pembela hak SOGIE untuk mempersembahkan pekerjaan mereka pada berbagai event sosial dan budaya, untuk memperkuat gambaran kehidupan 'queer' sebagai salah satu ciri kebudayaan Indonesia;
- Menunjang pelatihan di Indonesia pada polisi dan pasukan keamanan lainnya mengenai pokok-pokok gender dan seksualitas;
- Secara aktif menyalahkan berbagai peraturan, kebijakan dan tindakan diskriminatif, termasuk penkriminalisasian hubungan seksual orang dewasa sesama jenis yang saling setuju atau yang beridentitas transgender, serta khususnya hukuman mati, penganiayaan atau tindakan tidak baik lainnya;

- Mendukung usaha yang diadakan dari pihak masyarakat maupun pemerintah untuk memonitor kasus-kasus kekerasan, pendidikan pegawai-pegawai penegak hukum dan orang-orang yang mencari dukungan, serta pemulihan kembali korban-korban kekerasan;
- Secara terbuka memonitor pelecehan verbal maupun fisik 'queerfobik' yang diucapkan pada persiapan kampanye Pemilu 2019 dan menyatakan kepada pemerintah Indonesia akan melakukannya;
- Memastikan semua pegawai diplomatik telah mendapat pelatihan sesuai Pedoman UE tentang Pembela HAM dan Pedoman UE tentang LGBT.

Rekomendasi kepada Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta:

- Menyatakan secara jelas komitmen terhadap Pembela HAM, berdasarkan lembar fakta Departemen Luar Negeri AS mengenai para pembela HAM, dan berunding secara teratur dengan para pembela hak SOGIE mengenai keperluan perlindungan mereka;
- Memastikan agar pedoman-pedoman mudah diperoleh dalam bahasa Inggris maupun Indonesia pada website kedutaan, dan semua pegawai kedutaan telah menerima pelatihan tentang pedoman-pedomannya;
- Mengorganisir tinjauan resmi dari Utusan Khusus AS mengenai Hak LGBT pada tahun 2018, mendesak pemerintah Indonesia agar menghentikan segera berbagai pemberantasan, penangkapan dan pengawasan para pembela hak SOGIE, dan bertemu dengan para pembela hak SOGIE;
- Mendorong dibuatkan oleh pemerintah Indonesia perubahan interaksi antara aparat kepolisian dan para pembela hak SOGIE dan masyarakatnya, terutama dalam hal kebijakan dan tindakan terhadap masyarakat ini dan respons terhadap kejadian kekerasan.

DECEMBER 2017

Follow Front Line Defenders
on Facebook, Twitter and YouTube

www.facebook.com/FrontLineDefenders
twitter.com/FrontLineHRD
www.youtube.com/FrontLineHRD



DUBLIN

Front Line Defenders - Head Office
Second Floor, Grattan House
Temple Road, Blackrock, A94 FA39
Co. Dublin, Ireland

Tel: 00 353 1 212 37 50
Fax: 00 353 1 212 10 01
Email: info@frontlinedefenders.org

BRUSSELS

Front Line Defenders – EU Office
Square Marie-Louise 72
1000 Brussels
Belgium

Tel: 00 32 230 93 83
Fax: 00 32 230 00 28
Email: euoffice@frontlinedefenders.org

WWW.FRONTLINEDEFENDERS.ORG



The ideas, opinions and comments in this publication are entirely the responsibility of Front Line Defenders and do not necessarily represent or reflect Irish Aid policy.

IRIS O'BRIEN
FOUNDATION



This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of Front Line Defenders and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.